

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan isu global yang terus-menerus didengungkan oleh PBB. Salah satunya adalah dengan terus diperbaharunya rencana pembangunan berkelanjutan dunia sebagai konsep yang melandasi suatu pengelolaan lingkungan dengan didorong oleh ekspansi kapitalisme global yang berdampak pada menurunnya kualitas pengelolaan lingkungan diberbagai negara. Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah seperti kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, hingga konservasi lingkungan. Salah satu permasalahan yang disoroti dalam SDGs adalah isu pengelolaan hutan beserta fungsi-fungsinya. Kondisi hutan dunia selama 35 tahun terakhir telah mencapai titik kritis hingga mendegrasi fungsi-fungsi utama hutan, yaitu fungsi konservasi, fungsi produksi dan fungsi lindung. Hal tersebut menjadi penyebab berbagai bencana alam yang terjadi didunia seperti banjir, tanah longsor, kabut asap, berkurangnya sumber air bersih, kekeringan, hingga perubahan iklim global yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian materi hingga korban jiwa. Target SDGs yang berkaitan dengan hutan antara lain adalah mengimplementasikan pengelolaan berkelanjutan untuk semua jenis hutan, memberantas penebang hutan, serta memulihkan degradasi hutan dengan reboisasi dan peremajaan hutan (United Nation, 2015, dalam Tanjung, dkk 2017).

Dalam pengelolaan sumberdaya alam dibutuhkan kemampuan dan ilmu untuk menanganinya secara tepat. Kekayaan alam merupakan kesempatan untuk membawa ekonomi Indonesia ke arah pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa kekayaan ini berguna bagi generasi mendatang. Terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan, Suharjito dan Darusman (1998) menyatakan bahwa pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan pembangunan yang tersentralisasi dan *top down* menuju pendekatan yang partisipatif memberikan imbas kepada pembangunan kehutanan. Pengelolaan sumberdaya hutan yang berbasis pada masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaan. Ciri utama

pendekatan tersebut adalah adanya pengaruh sistem sosial setempat yang cukup kuat pada proses pengambilan keputusan. Pada sistem pengelolaan ini masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumberdaya alam sekitarnya.

Hutan yang luas merupakan keuntungan dan juga tantangan bagi pembangunan daerah. Hutan merupakan sumberdaya alam terbaharui yang memiliki nilai ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta berkontribusi terhadap kehidupan manusia. Nilai atau fungsi hutan yang sangat penting tersebut diantaranya adalah sebagai pengatur hidrologi, penyuplai oksigen (O₂), filter polusi udara, menjaga kesuburan tanah, pengawetan keanekaragaman hayati serta sebagai sumber plasma nutfah. Meskipun hutan memiliki berbagai manfaat, jika tidak dikelola dengan benar dapat memberikan dampak buruk dengan ragam potensi bencana serta potensi konflik bagi pemerintah dan masyarakat sekitar hutan, dimana sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sumberdaya hutan.

Dalam pemberdayaan hutan diperlukan adanya pembaharuan bentuk sistem pengelolaan hutan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Salah satu kebijakan yang mencerminkan hal tersebut adalah keputusan menteri kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tanggal 12 Juli 2004 tentang pemberdayaan masyarakat setempat didalam dan atau sekitar hutan dalam rangka perhutanan sosial (social Forestry).

Program perhutanan sosial sudah dikembangkan sejak tahun 1984. Pada perkembangannya, keberhasilan program perhutanan sosial sangat bergantung pada banyak faktor diantaranya adalah kondisi biofisik lahan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Artinya model program perhutanan sosial di satu lokasi belum tentu sesuai atau cocok untuk lokasi lain (Hakim dkk, 2010).

Esensi dari program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) adalah partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan ikut serta dalam pengamanan dan perlindungannya untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat (Gunawan, dkk 2014). Dengan kata lain, sesuai dengan modul pelaksanaan pengelolaan PHBM oleh kementerian kehutanan, partisipasi masyarakat merupakan fitur kunci dan keberhasilan program

PHBM. Dengan konsep terbaru tersebut, PHBM terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dampak positif tersebut dapat berupa peningkatan penghasilan masyarakat, meningkatkan kelestarian lingkungan hutan, menurunkan kasus pembalakan liar, dan berkurangnya lahan kosong karena peran aktif masyarakat dalam mengolah lahan dan melakukan reboisasi (Tanjung, dkk 2017).

Kegiatan pemberdayaan kelompok tani hutan relatif rendah karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan diakibatkan seluruh kegiatan sudah ditentukan lebih dulu oleh Perhutani (Utama, dkk 2010). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masih tergolong rendah dikarenakan rendahnya tingkat keberdayaan dan kurang optimalnya tingkat kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sebagian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program, serta tidak adanya penyuluhan yang teratur mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, sehingga masyarakat menjadi kurang termotivasi dalam melaksanakan kegiatan program secara keseluruhan. Padahal perlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dalam rangka pelestarian dan pengelolaan hutan merupakan hal mendasar untuk mengembangkan dan membangun kesadaran kritis masyarakat pengelola hutan (Suprayitno, 2011 dalam Tanjung, dkk 2017).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berkaitan dengan beberapa faktor. Faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan antara lain : faktor internal (umur, pendidikan formal/non formal, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan usaha tani, pengalaman berusaha tani, motivasi berusaha) faktor eksternal (penyuluhan kehutanan, kelompok tani hutan, dan sumber informasi, serta kompetensi petani). Dukungan para pihak sangat dibutuhkan agar pengelolaan hutan rakyat lebih meningkatkan keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat, secara ekologis mampu menjaga kelestarian lingkungan, dan secara sosial budaya mampu mempertahankan tata nilai dan norma sosial budaya yang mampu mendukung kehidupan masyarakat dipedesaan lebih produktif (Fauzi, 2009).

Guna mendukung pengelolaan hutan oleh masyarakat, KLHK mengeluarkan peta indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) yang menunjukkan lokasi-lokasi perhutanan sosial seluas kurang lebih 12,7 juta hektar, PIAPS merupakan peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial. Untuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat, lokasinya terutama pada hutan negara yang belum ada izin pengelolaannya. Untuk Kemitraan kehutanan berada pada hutan negara yang telah ada izin pengelolaannya. Sementara Hutan Adat merupakan pengakuan dan perlindungan wilayah masyarakat hukum adat baik dikawasan hutan negara maupun diluar kawasan hutan negara. Kendatipun telah ditentukan lokasi Perhutanan Sosial melalui PIAPS, namun tetap terbuka kemungkinan untuk masyarakat mengusulkan lokasi perhutanan sosial melalui mekanisme revisi peta PIAPS yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.

B. Rumusan Masalah

Perhutanan sosial pada intinya merupakan mata rantai yang menghubungkan antara kelestarian hutan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Sebelum adanya program perhutanan sosial, hutan tidak bisa dikelola secara legal, masyarakat sekitar hanya bisa melihat tanpa boleh mengelola hutan. Namun, dengan program ini masyarakat bisa memanfaatkan lahan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perhutanan sosial merupakan program yang langsung digerakkan oleh pemerintah dengan mengajak para masyarakat sekitar hutan untuk ikut berpartisipasi didalam pengembangan hutan. Partisipasi yang dimaksud adalah masyarakat ikut serta dan terjun langsung kelapangan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan guna mengelola hutan. Perlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mendapat perhatian dan dianggap sangat penting, mengingat bahwa masyarakat yang berdomisili didalam dan disekitar kawasan hutan merupakan masyarakat miskin dan rentan terhadap perubahan pembangunan.

Meski demikian, masih saja ditemukan implementasi yang belum optimal karena rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program PHBM di lapangan,

rendahnya peran serta lembaga masyarakat pengelola hutan dan pesanggem (penggarap), dan belum luasnya jaringan kerjasama. Selain itu, partisipatif yang berjalan kurang optimal serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan PHBM juga turut menjadi penyebab utama kurang berkembangnya program PHBM di lapangan.

Program perhutanan sosial yang memberikan akses bagi masyarakat untuk mengelola hutan milik negara sangat menguntungkan masyarakat Sumatera Barat, karena lebih dari setengah daerah itu adalah hutan sehingga manfaat yang diterima juga lebih besar. Pengelolaan hutan tanpa melibatkan peran masyarakat akan berdampak timbulnya permasalahan dengan masyarakat. Masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar hutan, selain untuk dikelola sebagai mata pencaharian, mereka akan lebih menjaga kelestarian hutan dari perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang sejak beberapa tahun terakhir melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, telah berkomitmen mendukung program pemerintah tersebut dan telah menjadikan perhutanan sosial sebagai dasar dalam pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan, sehingga kewenangan pemerintah provinsi menjadi lebih besar dalam pengelolaan kawasan hutan tingkat provinsi.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang menerapkan PHBM dalam bentuk Hutan Desa yang dinamakan Hutan Nagari. Nagari merupakan istilah yang menggambarkan masyarakat yang tersusun ke dalam unit kesatuan masyarakat adat di Sumatera Barat. Pengelolaan Hutan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sudah berjalan sejak tahun 2014.

Pelaksanaan pengelolaan hutan nagari dimaksudkan untuk memberikan akses kepada nagari melalui lembaga nagari dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari dengan prinsip partisipatif untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi program pemerintah akan dianggap gagal, sehingga tujuan akhir pengelolaan Hutan Nagari sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan

yaitu pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan menjadi tidak berjalan.

Meskipun selama ini masyarakat sudah berkontribusi didalam pengelolaan hutan, namun pengelolaan tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini juga dikarenakan pengelolaan hutan masih belum berpihak sepenuhnya kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan hutan nagari sungai buluh timur perlu untuk diketahui, mengingat keberlanjutan kegiatan ini sangat tergantung pada partisipasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pengolah lahan dalam pengelolaan perhutanan sosial di Nagari Sungai Buluh Timur?
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pengolah lahan dalam pengelolaan perhutanan sosial di Nagari Sungai Buluh Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pengolah lahan dalam pengelolaan perhutanan sosial.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat pengolah lahan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan perhutanan sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi pemerintah, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk menerapkan kebijakan dan untuk memperbaiki sistem pengelolaan perhutanan, serta evaluasi dalam menjalankan program hutan sosial.
2. Bagi peneliti, Untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah serta penerapan ilmu atau teori yang didapat selama perkuliahan.
3. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi serta masukan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat terutama dalam pengelolaan wilayah perhutanan.